

Kajian Spasial Temporal Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah

Yuria Sari¹

¹Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, IPB University,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia
e-mail: yuriasari@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Berbagai pendekatan dilakukan untuk mengkaji bagaimana kemiskinan ini tumbuh dan berkembang yang kemudian dibarengi dengan pencarian solusi serta strategi yang tepat untuk mengatasinya. Kemiskinan dalam perspektif spasial dapat memberikan gambaran tersendiri bagaimana kondisi wilayah sebagai tempat masyarakat bermukim dapat menjadi sebab-akibat dari keberadaan masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah dengan unit analisis di tingkat kabupaten/kota pada tiga titik tahun yaitu 2012, 2017 dan 2022. Analisis yang digunakan² yaitu indeks moran dan *Local Indicator of Spatial Autocorrelation* (LISA). Hasil penelitian menemukan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan analisis Indeks moran, nilai *I* di tahun 2012, 2017, dan 2022 secara berturut-turut yaitu 0,258, 0,303 dan 0,229. Nilai Indeks di tiga titik tahun tersebut bernilai positif sehingga disimpulkan bahwa keterkaitannya membentuk pola berkelompok (*clustered*) meskipun kekuatannya keterkaitannya cukup lemah. Kemudian Hasil pada tiga titik tahun tersebut menunjukkan kesamaan yaitu terdapat enam kabupaten yang menjadi *hotspot* kemiskinan di Jawa Tengah yang didasarkan data persentase penduduk miskin. Enam kabupaten tersebut di antaranya Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Purworejo. Artinya kemiskinan di semua wilayah ini tergolong tinggi dan begitu pun di wilayah sekitarnya.

Kata kunci: kemiskinan, LISA, moran, pola spasial

Abstract

*Various approaches are taken to examine how poverty grows and develops, accompanied by the search for solutions and appropriate strategies to overcome it. Poverty in a spatial perspective can provide a picture of how the condition of the region where people live can be a cause and effect of the existence of poverty. This research was conducted in Central Java Province with the unit of analysis at the district/city level at three points, namely 2012, 2017, and 2022. The analysis used is the Moran Index and Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA). The results found that poverty in Central Java Province based on the Moran Index analysis, the value of *I* in 2012, 2017, and 2022 was 0.258, 0.303, and 0.229, respectively. The Index value at the three points of the year is positive, so it is concluded that the relationship forms a clustered pattern even though the strength of the relationship is quite weak. Then the results at three points of the year show similarities, namely that six districts are poverty hotspots in Central Java based on data on the percentage of poor people. These six regencies include Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, and Purworejo. This means that poverty in all of these areas is high, and so is the surrounding areas.*

Key words: LISA, moran index, poverty, spatial pattern

PENDAHULUAN

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan suatu kelompok (Rahardhani, 2021). Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan terutama di negara berkembang di antaranya laju pertumbuhan penduduk dan angka pengangguran yang tinggi, distribusi pendapatan yang tidak merata, serta rendahnya laju pertumbuhan ekonomi. Kajian terkait kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan karena masih tingginya angka kemiskinan itu sendiri serta kompleksnya sebab-akibat dari adanya fenomena sosial ini. Lingkaran setan kemiskinan menjadi sebutan populer untuk menggambarkan kompleksitas tersebut. Hal ini suatu tantangan untuk mencapai target pengurangan kemiskinan di Indonesia. Upaya dalam penurunan kemiskinan di Indonesia harus terus digenjut hingga mencapai target kemiskinan 0,5 – 0,8% di tahun 2045 (Bappenas, 2024) atau dalam jangka waktu yang lebih pendek, pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin turun sekitar 5,04 juta sampai 6,45 juta dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024 (Hasibuan dan Hasibuan, 2022).

Berbagai pendekatan dilakukan untuk mengkaji bagaimana kemiskinan ini tumbuh dan berkembang yang kemudian dibarengi dengan pencarian solusi serta strategi yang tepat untuk mengatasinya. Kajian sosial masyarakat, analisis ekonomi, kebijakan publik, hukum, hingga spasial/kewilayahan merupakan beberapa perspektif yang dapat digunakan dalam mengkaji kemiskinan. Kemiskinan dalam perspektif spasial dapat memberikan gambaran tersendiri bagaimana kondisi wilayah sebagai tempat masyarakat bermukim dapat menjadi sebab-akibat dari keberadaan masyarakat miskin. Kondisi kemiskinan menjadi kompleks dan berbeda sehingga menarik untuk dilihat secara spasial karena karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat berkaitan dengan karakteristik ruang (Naldi, et al., 2020). Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri terkait hal ini. Penelitian ini berlandaskan pada hukum Tobler dimana Tobler (1979) dalam Lee dan Wong (2001), Saputro et al., (2018) menyebutkan pada dasarnya semua mempunyai keterkaitan/keterhubungan satu dan yang lainnya, hanya saja sesuatu yang lebih dekat mempunyai keterhubungan erat dibanding yang berjauhan. Landasan ini menjadi acuan untuk melihat efek spasial antarwilayah dengan wilayah lainnya.

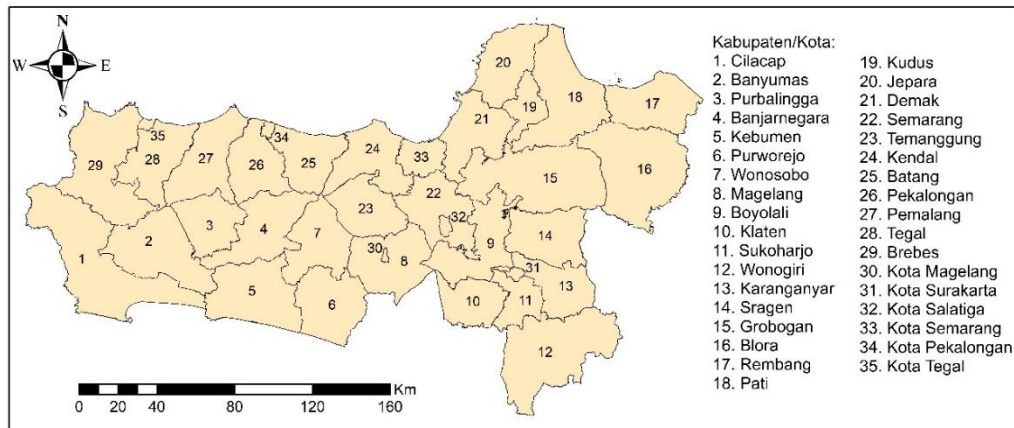
Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur yang mencapai 13,46% dari total penduduk Indonesia. Tingginya jumlah penduduk tentu memiliki kelebihan dan ancamannya tersendiri dalam mengelola sumber daya manusia yang berlimpah. Termasuk diantaranya bagaimana upaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi di wilayah

tersebut. Sejalan dengan jumlah penduduknya yang tinggi, berdasarkan data BPS (2024) Jawa Tengah juga menduduki posisi ketiga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dimana 10,47% diantaranya merupakan penduduk miskin atau sekitar 3,7 juta jiwa (BPS, 2024). Dengan potensi wilayah yang beragam tentu saja perlakuan setiap kebijakan antar wilayah juga beragam. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan mengandung dimensi spasial (SMERU, 2008). Terdapat kecenderungan bahwa lokasi masyarakat miskin tidaklah acak, tetapi cenderung mengelompok pada lokasi-lokasi dengan karakteristik tertentu (Irawan, 2013).

Autokorelasi spasial merupakan salah satu analisis spasial untuk mengetahui pola spasial hubungan atau korelasi antar lokasi amatan (*analyzing pattern*) (Purbani, 2023) yang salah satunya dapat dilakukan dengan koefisien Indeks Moran Global dan *Local Indicator of Spatial Autocorrelation* (LISA). Metode ini sangat penting untuk mendapatkan informasi mengenai pola penyebaran karakteristik suatu wilayah dan keterkaitan antar lokasi didalamnya (Bekti, 2012). River et al., (2011) dalam Moniyana dan Pratama (2020) menyebutkan dengan menggunakan Indikator Moran's I, dapat mengidentifikasi apakah "Hot Spot" dan "Cold Spot" memiliki pola kemiskinan yang teraglomerasi atau justru tersebar. Bukti kluster di antara kabupaten/kota dan kebijakan pengentasan kemiskinan harus dipertimbangkan ketika cluster-cluster tersebut diidentifikasi. Analisis autokorelasi spasial terhadap kemiskinan di Jawa Tengah sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Irawan (2013) dan Rahardhani (2021). Namun, pada Irawan (2013) belum menambahkan unsur waktu (temporal) dalam penelitiannya artinya, hanya pada satu titik waktu tertentu, sedangkan Rahardhani (2021) penelitian dilakukan pada 2 titik tahun. Dari berbagai penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memetakan serta menganalisis secara spasial bagaimana pola keruangan dari kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan tiga titik tahun yaitu 2012, 2017, dan 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data kemiskinan pada unit kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menggunakan data persentase penduduk miskin dimana merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berkategori miskin dengan total penduduk. Sedangkan definisi penduduk miskin disini yaitu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (merujuk pada definisi BPS). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bersifat temporal dengan mengambil tiga titik waktu yaitu tahun 2012, 2017 dan 2022. Berikut merupakan Peta Lokasi Penelitian:



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Analisis Moran Index

Perhitungan indeks Moran merupakan salah satu *alat analisis* untuk mengetahui autokorelasi spasial (keterkaitan spasial) antarwilayah amatan yang satu dengan wilayah lain di sekitarnya (*Neighbor*). Sesuai hukum Tobler, karakteristik suatu daerah akan memengaruhi (atau dipengaruhi) oleh karakteristik daerah yang lebih dekat. Perhitungan Indeks Moran memperlihatkan besarnya ketergantungan daerah dengan daerah lain di sekelilingnya. Formula menghitung Moran Indeks berikut ini:

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Keterangan:

I : *Moran's Index*

N : Jumlah wilayah studi (kabupaten)

x_i : Nilai pada kabupaten i

x_j : Nilai pada Kabupaten j

w_{ij} : Bobot yang terstandarisasi antara kabupaten i dan j

Rentang nilai yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Indeks Moran yakni $-1 < I < 1$. Semakin angkanya mendekati satu maka autokorelasi positif semakin kuat, maupun sebaliknya. Kemudian, apabila I bernilai positif, maka data membentuk pola berkelompok (Clustered) dan apabila I bernilai negatif maka pola membentuk pola menyebar/berpencar (dispersed).

Perhitungan Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA)

LISA merupakan kelanjutan analisis dari indeks moran dimana jika indeks moran digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan/keterkaitan secara menyeluruh

dalam satu kawasan, sedangkan LISA digunakan untuk melihat keterkaitan secara parsial (*local*) dalam satu kawasan (Sihombing, 2022; Lestari, 2023). Nilai LISA yang semakin tinggi menandakan wilayah tersebut berdekatan dan hampir sama (membentuk pola penyebaran menggerombol). Adapun formula LISA sebagai berikut:

$$I_i = Z_i \sum_{j=1}^n W_{ij} Z_j$$

Keterangan:

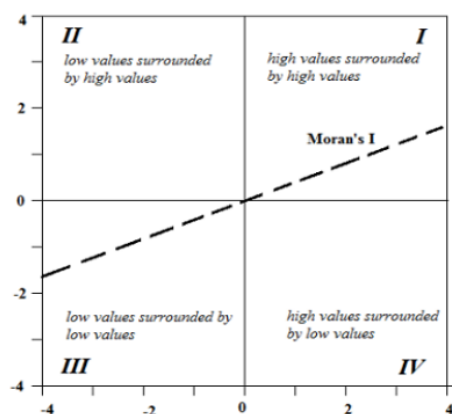
I_i : Koefisien LISA

Z_i, Z_j : Data telah sudah mengalami standarisasi

W_{ij} : Pembobotan antarkabupaten desa i dan j

Zhukov (2010) memetakan tingkat kemiskinan wilayah yang dibagi menjadi 4 kuadran yakni:

- Kuadran 1, H-H (*High-High*): pengelompokan kabupaten kemiskinan tinggi yang dikelilingi kabupaten dengan kemiskinan tinggi pula;
- Kuadran 2, L-H (*Low-High*): pengelompokan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan rendah, namun dikelilingi kabupaten dengan kemiskinan tinggi;
- Kuadran 3, L-L (*Low-Low*): pengelompokan kabupaten kemiskinan rendah dan dikelilingi kabupaten kemiskinan rendah juga; dan
- Kuadran 4, H-L (*High-Low*): pengelompokan kabupaten kemiskinan tinggi, namun dikelilingi kabupaten yang memiliki kemiskinan rendah.

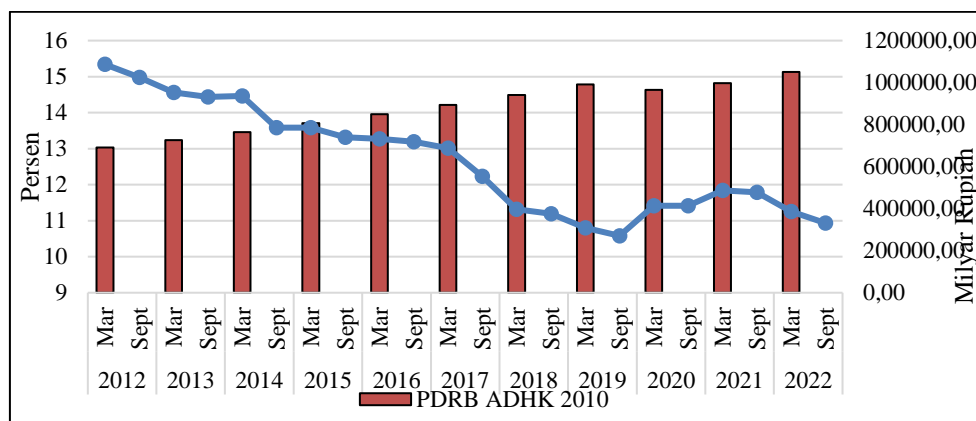


Gambar 2. Pembagian Kuadran Indeks Moran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2012 hingga 10 tahun setelahnya, tren kemiskinan di Jawa Tengah terus menurun dari titik tertinggi persentase penduduk miskin di angka 15,34% hingga paling rendah di 10,58%. Guncangan perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan kembali meningkat dari tahun 2020 awal hingga 2023. Perlu waktu sekitar satu tahun untuk memperbaiki perekonomian Jawa Tengah hingga persentase penduduk miskin dapat ditekan kembali. Selain itu, rasio Gini, atau ketimpangan pengeluaran antara kaya dan miskin di Jawa Tengah, pada September

2022 yaitu 0,366. Masih cukup tinggi terutama di wilayah perkotaan. Dalam pembahasan masalah dalam perekonomian seperti kemiskinan hingga gini rasio, data PDRB akan selalu dikaitkan dengan dua hal tersebut. PDRB sering dijadikan ukuran dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang mana dari pertumbuhan ini dapat mengurangi angka kemiskinan hingga ketimpangan. Pada gambar 2, terjadi tren kenaikan PDRB Jawa Tengah dari tahun 2012 hingga 2022. Kenaikan ini diperkirakan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang. Adanya pola ini menandakan bahwa perekonomian Jawa Tengah cukup berhasil dalam menanggulangi masalah kemiskinan di wilayah tersebut namun upaya dalam penurunan kemiskinan harus terus digenjut hingga mencapai target penurunan kemiskinan nasional.

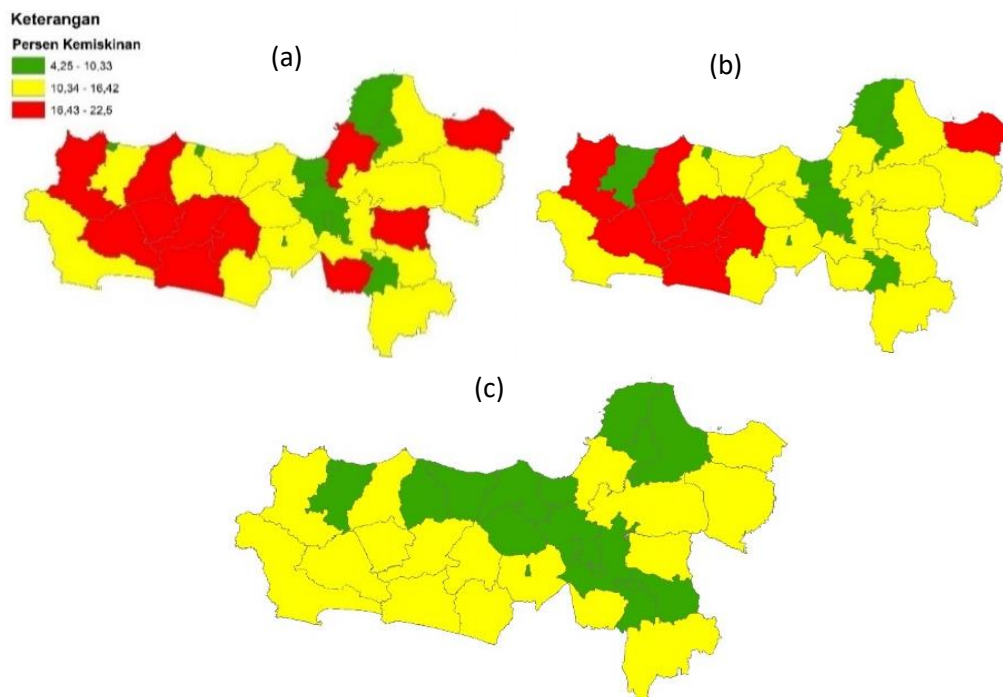


Gambar 3. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dan PDRB ADHK 2010 Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2012 – 2022
(Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024)

Untuk mempermudah dalam mendeskripsikan kondisi kemiskinan dalam perspektif spasial, maka disajikan Peta Perkembangan Kluster Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012, 2017, dan 2022 pada gambar 2. Kluster dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan data persentase penduduk miskin di ketiga titik waktu tersebut yaitu rendah (4,25% – 10,33%), sedang (10,34 – 16,42%) dan tinggi (16,43% – 22,5%). Dapat terlihat bahwa terjadi penurunan kemiskinan di setiap titik tahun. Di 2012 dan 2017 yang awalnya Kabupaten Demak, Klaten, Sragen yang berada di kelas tinggi beralih ke kelas sedang. Kelas persentase penduduk miskin yang tinggi berada di bagian barah hingga menyebar sampai ke Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo dimana wilayah ini merupakan wilayah pegunungan di Jawa Tengah yang identik dengan sektor pertanian. Kemudian, di tahun 2022, tidak ada lagi kabupaten dan kota yang berada di kelas dengan persentase penduduk miskin yang tinggi. Bila ditarik garis lurus, kelas rendah

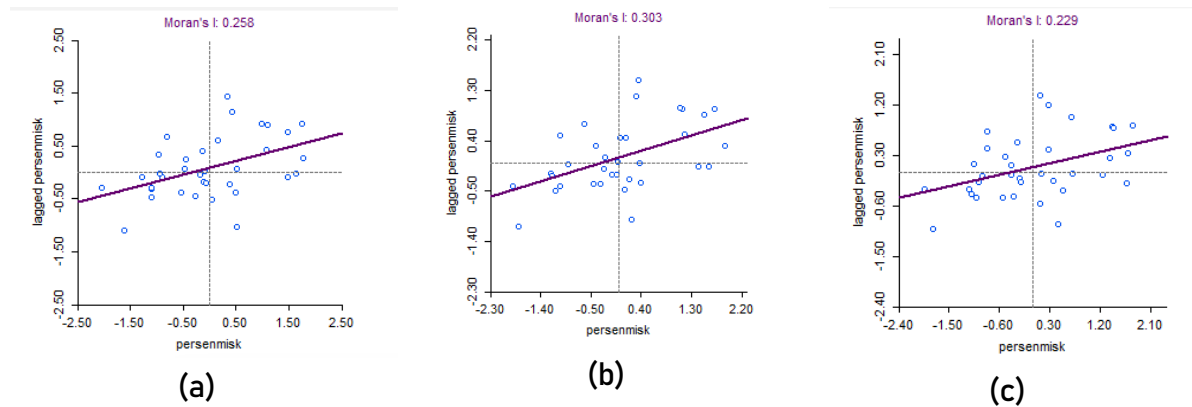
menyebar sesuai dengan aksesibilitas wilayah-wilayah perkotaan dimulai dari Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Salatiga hingga ke Kota Surakarta. Hal ini menjadi modal utama dalam memahami bagaimana pengaruh karakteristik wilayah tertentu dengan wilayah sekitarnya dan dapat pula sebaliknya.



Gambar 4. Peta Distribusi Kemiskinan Jawa Tengah
(a) 2012, (b) 2017 dan (c) 2022
(Sumber: Hasil olah data, 2024)

Indeks moran didapat melalui pengolahan data sekunder dari aplikasi Geoda. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapat bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada unit analisis di tingkat kabupaten/kota, di tahun 2012 nilai I yaitu 0,258, tahun 2017 meningkat di 0,303 dan tahun 2022 menurun lagi diangka 0,229. Nilai Indeks di tiga titik tahun tersebut bernilai positif sehingga disimpulkan bahwa keterkaitannya membentuk pola berkelompok (Clustered) meskipun kekuatannya keterkaitannya cukup lemah. Sedikit berbeda dengan Irawan (2013) yang menganalisis kemiskinan dengan unit analisis di tingkat kecamatan di Jawa Tengah tahun 2011, menemukan bahwa asosiasi yang cukup kuat antara lokasi dengan persentase jumlah penduduk miskin dengan nilai indeks moran sebesar 0,459. Perbedaan ini bisa diakibatkan karena unit analisis sumber data yang berbeda. Walaupun demikian, hasil Indeks Moran ini dapat melihat kabupaten/kota yang merupakan kantong-kantong kemiskinan di Jawa tengah karena terbentuknya pola

mengelompok. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Rahardhani (2021) yang menggunakan data tahun 2015 dan 2019.



Gambar 5. Moran's Scatterplot Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah
(a) 2012 (b) 2017 dan (c) 2022

Berdasarkan kuadran global moran, didapat bahwa secara spasial di tahun 2012, ke 2017 hingga 2022, kondisi kemiskinan di Kabupaten dan Kota tidak jauh berubah. Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Pekalongan dan Sragen yang mengalami sedikit perubahan pposisi kuadran. Pada kuadran 1 dimana kabupaten dengan kemiskinan tinggi juga di kelilingi oleh kabupaten/kota yang persentase penduduk miskinnya juga tinggi berjumlah 9 kabupaten yang berada di bagian barat Jawa Tengah. Kemudian kuadran 2 dimana kabupaten yang kemiskinannya rendah dikelilingi oleh kabupaten yang kemiskinan tinggi berjumlah 4 kabupaten/kota. Kuadran 3 dengan didominasi oleh wilayah perkotaan serta bagian pesisir utara Jawa Tengah terdapat 13 kabupaten/kota. Wilayah ini adalah kabupaten/kota yang kemiskinannya rendah dan kemiskinan di wilayah sekitar juga rendah. Terakhir, kuadran 4 terdiri dari 6 kabupaten kota dimana wilayah tersebut tingkat kemiskinannya tinggi sedangkan kemiskinan di daerah sekitarnya rendah. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

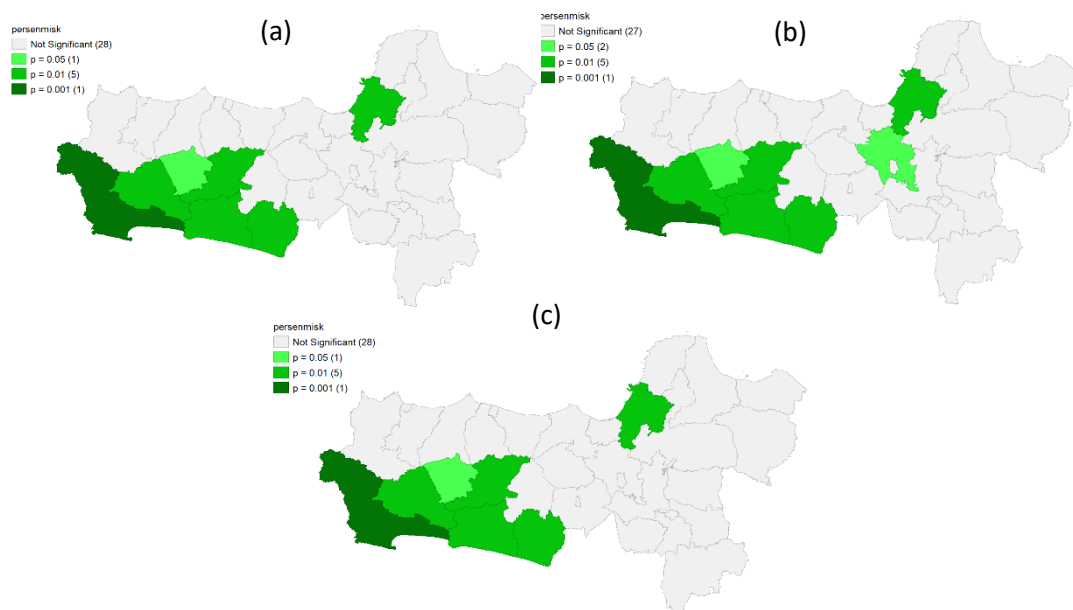
Tabel 1. Hasil Kuadran Indeks Moran Kemiskinan Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2012	2017	2022
Tidak terjadi perubahan:			
• Kuadran 1:	HH	HH	HH
Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Blora, Pemalang,			
• Kuadran 2:	LH	LH	LH

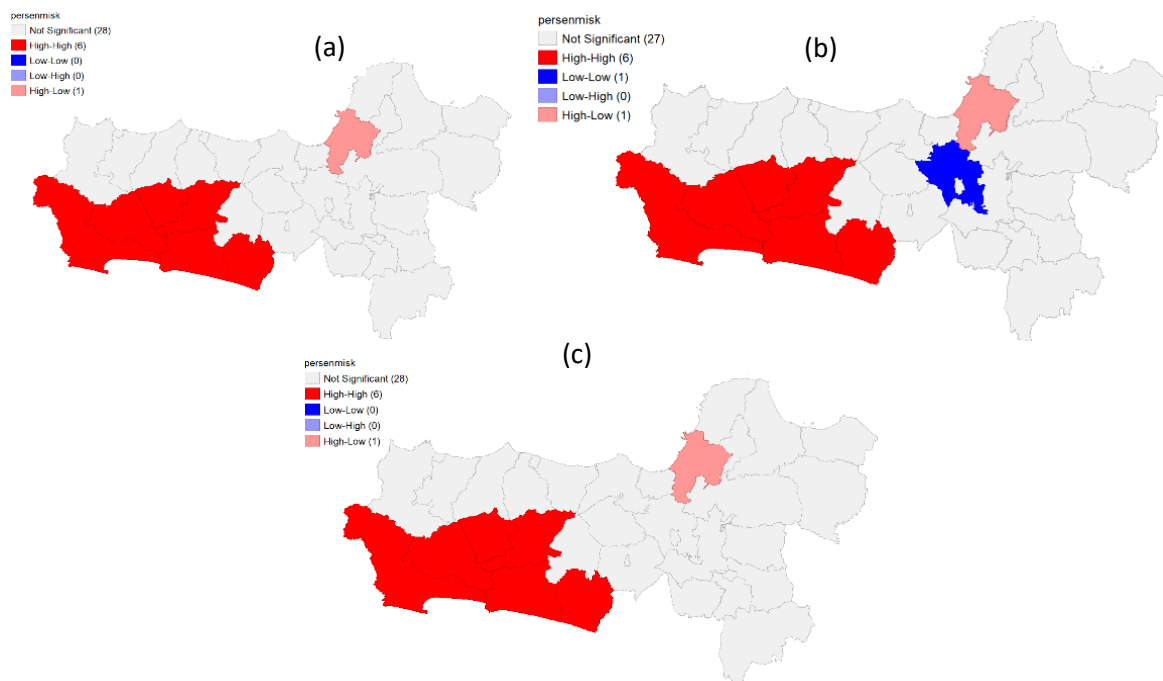
Kabupaten/Kota	Tahun		
	2012	2017	2022
Temanggung, Batang, Tegal, Kota Tegal			
• Kuadran 3:	LL	LL	LL
Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Kendal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan			
• Kuadran 4:	HL	HL	HL
Klaten, Wonogiri, Grobogan, Rembang, Demak, Brebes			
Terjadi perubahan:			
Magelang	LH	LH	HL
Sragen	HH	HH	HL
Pekalongan	LH	HH	LH
Kota Magelang	LL	LL	LH

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Jika indeks moran untuk melihat keterkaitan wilayah secara global, maka untuk memperinci hasil penelitian selanjutnya dilakukan analisis Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA). Pada analisis LISA menggunakan aplikasi Geoda, dihasilkan berupa dua peta yaitu peta signifikansi dan peta *clustering*. Berikut dapat ditampilkan pada gambar 5 dan 6.



Gambar 6. Peta Signifikansi LISA Data Persentase Penduduk Miskin Tahun (a) 2012, (b) 2017, dan (c) 2022



Gambar 7. Peta *Clustering* LISA Data Persentase Penduduk Miskin Tahun
(a) 2012, (b) 2017, dan (c) 2022

Menguatkan hasil kuadran pada *moran's scatterplot* diatas, bahwa *hotspot* kemiskinan di Jawa Tengah berada di kabupaten bagian barat hingga ke pesisir selatan Jawa Tengah. Hasil pada tiga titik tahun tersebut menunjukkan kesamaan yaitu terdapat enam kabupaten yang menjadi *hotspot* kemiskinan di Jawa Tengah yang didasarkan data persentase penduduk miskin. Enam kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Purworejo. Secara kondisi fisik wilayah, semua kabupaten kota ini memiliki beberapa kemiripan yaitu berada di wilayah pegunungan pada bagian utara dan pesisir di bagian selatan. Perlu ada perhatian khusus dalam penentuan kebijakan daerah dalam penanganan kemiskinan di kabupaten-kabupaten tersebut agar dapat setara perkembangan ekonomi dengan wilayah lain. Terdapat beberapa kesamaan hasil terhadap penelitian Irawan (2013) yang menemukan bahwa kantong-kantong kemiskinan sebagian besar terdapat di Kabupaten Cilacap, Brebes, Banyumas dan Grobogan. Kesamaan lain antara ketiga titik tahun ini yaitu Kabupaten Demak yang selalu berada di kelas High-Low sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah keadaan wilayah sekitar yang kemiskinannya rendah selama sepuluh tahun periode belum mampu membawa Demak untuk mengurangi kemiskinan di wilayahnya. Sedangkan untuk cold-spot hanya terdapat di tahun 2017 yaitu di Kabupaten Semarang artinya

selain kabupaten ini memiliki penduduk miskin yang rendah, daerah sekitarnya juga rendah. Hasil ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Irawan (2013).

Sebagian besar survei rumah tangga nasional menunjukkan bahwa meskipun suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan, angka kemiskinan mempunyai dimensi regional yang kuat, sehingga pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan merupakan hasil yang diinginkan dalam rangka mengatasi kemiskinan ekonomi dan memungkinkan pemerataan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi dimensi geografis kemiskinan ini. Adanya kluster kemiskinan yang dipetakan berdasarkan karakteristik kondisi masing-masing daerah menunjukkan perlunya mempertimbangkan pola spasial dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemetaan spasial kemiskinan merupakan peluang sekaligus tantangan untuk memfasilitasi munculnya strategi, rencana dan program pengentasan kemiskinan (Hasibuan, et al., 2019). Dengan adanya pemetaan ini, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pihak berwenang untuk meninjau bagaimana kebijakan, strategi dan rencana pemerintah setempat dalam rangka memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada unit analisis di tingkat kabupaten/kota berdasarkan analisis Indeks moran global didapat bahwa di tahun 2012 nilai I yaitu 0,258, tahun 2017 meningkat di 0,303 dan tahun 2022 menurun lagi diangka 0,229. Nilai Indeks di tiga titik tahun tersebut bernilai positif sehingga disimpulkan bahwa keterkaitannya membentuk pola berkelompok (Clustered) meskipun kekuatannya keterkaitannya cukup lemah. Kemudian *hotspot* kemiskinan di Jawa Tengah berada di kabupaten bagian barat hingga ke pesisir selatan Jawa Tengah. Hasil pada tiga titik tahun tersebut menunjukkan kesamaan yaitu terdapat enam kabupaten yang menjadi hotspot kemiskinan di Jawa Tengah yang didasarkan data persentase penduduk miskin. Enam kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Purworejo. Artinya kemiskinan di keenam wilayah ini tergolong tinggi dan begitupun di wilayah sekitarnya. Secara kondisi fisik wilayah, semua kabupaten kota ini memiliki beberapa kemiripan. Perlu ada perhatian khusus dalam penentuan kebijakan daerah dalam penanganan kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut agar dapat setara perkembangan ekonomi dengan wilayah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga hasil dari penelitian ini dapat terpublikasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas (Badan Perencanaan Nasional). 2024. "SDGs adalah Pokok Penting Acuan Mencapai Indonesia Emas 2045". <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Bekti, R. D. (2012). Autokorelasi Spasial untuk identifikasi pola hubungan kemiskinan di Jawa Timur. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 3(1), 217-227.
- BPS Jawa Tengah. (2024). "Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2012 - 2023". <https://jateng.bps.go.id/>
- BPS Jawa Tengah. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah (miliar rupiah), 2012 - 2022. <https://jateng.bps.go.id/>
- BPS. 2024. "Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2024". <https://www.bps.go.id/>
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., dan Mulatsih, S. (2019). Analisis sebaran dan faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 7(2), 79-91.
- Hasibuan, S., dan Hasibuan, M. H. (2022). Pemetaan Efek Spasial Kemiskinan Seluruh Kabupaten Di Indonesia. *REKSABUMI*, 1(1), 17-31.
- Irawan, E., Haryanti, N., dan Priyanto, E. (2013). Pola Spasial Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Analisis Eksploratif dalam Seminar Nasional Pendayagunaan Informasi Geospasial Untuk Optimalisasi Otonomi Daerah Tahun 2013. ISBN: 978-979-636-152.
- Lee, J. dan Wong D.W.S. (2001). *Statistical Analysis ArchView GIS*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Lestari, W., Brata, A. S., Anhar, A., dan Rahmawati, S. (2023). Analisis Autokorelasi Spasial Global dan Lokal Pada Data Kemiskinan Provinsi Bali. *Jambura Journal of Mathematics*, 5(1), 218-229.
- Moniyana, R., dan Pratama, A. D. (2021). Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 31-45.
- Naldi, A., Siregar, H., dan Mulatsih, S. (2023). Analisis Pola Spasial dan Sebaran Penduduk Miskin di Kabupaten Mandailing Natal. *TATALOKA*, 25(2), 121-132.
- Purnami, I., Rustiadi, E., dan Pravitasari, A. E. (2023). Sebaran Dan Keragaman Spasial Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Tegal (Distribusi Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Tegal). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2284-2295.
- Rahardhani, Priesma Ayunetha. (2021). Analisis Spasial Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 89 hlm.

- Saputro, D. R. S., Widyaningsih, P., Kurdi, N. A., dan Susanti, A. (2018). Proporsionalitas Autokorelasi Spasial dengan Indeks Global (Indeks Moran) dan Indeks Lokal (Local Indicator of Spatial Association (LISA)). KNPMP III 2018. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sihombing, A. O. (2022). Analisis Spasial Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, 1(1), 64-77.
- SMERU, 2008, The Poverty Map of Indonesia: Genesis and Significance, Newsletter No. 26: May-Aug/2008. SMERU Research Institute, Jakarta, Indonesia.